

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) adalah suatu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan perusahaan dengan pemegang saham dan disarankan bahwa tanggung jawab sosial ialah jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan (Giannarakis, 2014).

Menurut Esa dan Ghazali (2012), pengungkapan tanggung jawab sosial ialah pemberian informasi mengenai factor sumber daya manusia, produk dan layanan, keterlibatan masyarakat dan masalah lingkungan.

Menurut Gray, Kouhy, dan Lavers (1995), ada tiga kelompok dalam teori untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial yaitu:

1. *Decision usefulness studies.* Pengungkapan sosial dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang *moderately important*.
2. *Economic theory studies.* Sebagai agen dari suatu principal yang mewakili seluruh *interest group* perusahaan, pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.
3. *Social and political theory studies.* Studi di bidang ini menggunakan teori *stakeholder*, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomipolitik. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Sehingga perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Teori legitimasi mengasumsikan perusahaan

yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan. Teori ekonomi politik mengasumsikan bahwa pengungkapan sosial dilakukan sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari lingkungannya agar perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi.

Di Indonesia, pelaksanaan dan pengetahuan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial termasuk masih baru dan mulai dikenal sejak pertengahan tahun 1990 (Setyorini & Ishak, 2012). Akan tetapi tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1) dikatakan bahwa perusahaan bisa menyajikan laporan contohnya laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, terutama untuk sektor industri yaitu faktor lingkungan hidup memegang peranan paling penting. Pernyataan diatas menyebutkan ialah perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan masih bersifat sukarela. Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan UU No. 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan laporan ini bukan bersifat sukarela saja, namun sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Karena pengungkapan tanggung jawab sosial bisa menunjukkan citra baik suatu perusahaan kepada masyarakat.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Gray *et al.* (1995) mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berubah-ubah dari waktu dan tempat jika dilihat dari sisi sifat dan volum pelaporan. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan suatu negara terhadap suatu isi dimana negara yang satu bisa menganggap sebuah isu ini penting namun negara yang lain memandang isu tersebut tidak penting, selain itu budaya dan norma aturan masyarakat yang berbeda-beda antar negara.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, variabel yang diuji untuk pengungkapan tanggung jawab sosial berbeda-beda antar peneliti. Hackston dan Milne (1996) melakukan sebuah penelitian pada 47 perusahaan terbesar yang terdaftar di *New Zealand Stock Exchange*. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan (Said, Zainuddin, & Haron, 2009; Muttakin, Khan, & Subramaniam, 2015), profitabilitas (Rahman, Zain, & Al-Haj, 2011; Firas, Perez, & Ariza, 2010), dan tipe industri (Giannarakis, 2014; Ghazali, 2007; Anas, Rashid, & Annuar, 2015) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel dependen.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Janggu, Joseph, dan Madi (2007) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dengan karakteristik perusahaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan Malaysia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* (Khan, Muttakin, & Siddiqui, 2012; Jizi, Salama, Dixon, & Stratling, 2014), ukuran KAP, struktur kepemilikan,

dan *directorship* perusahaan terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel komposisi dewan direksi, dualitas CEO, eksistensi komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing (Said *et al.*, 2009), kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, audit eksternal perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas (Al-Ajmi, Al-Mutairi, & Al-Duwaila, 2015) dengan tipe industri sebagai variabel kontrol.

Said *et al.* (2009) melakukan penelitian untuk meneliti hubungan karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian dilakukan pada 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2006. Dengan variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan direksi (Haji, 2013), komisaris independen, dualitas CEO, komite audit, konsentrasi kepemilikan (Haji, 2013), kepemilikan manajerial (Akhtaruddin & Haron, 2010), kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Akhtaruddin dan Haron (2010) melakukan penelitian tentang pengungkapan sukarela pada 124 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, independensi dewan direksi, dan jumlah direktur yang berpengalaman, ukuran KAP, ukuran Perusahaan, dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Soliman, Din, dan Sakr (2012) meneliti tentang *Ownership Structure* dan *Corporate Social Responsibility*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara empiris menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial di Mesir sebagai salah satu negara berkembang dengan menggunakan sampel 42 perusahaan mencakup periode 2007-2009. Para peneliti menggunakan

variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, umur perusahaan, ukuran perusahaan, *firm performance*, dan *firm survival*.

Peneliti Naser dan Hassan (2013) meneliti pengaruh profitabilitas (Mulyadi & Anwar, 2012; Said, Zainuddin & Haron, 2009), *leverage*, tipe industri. Di tahun yang sama, Bin dan Taha (2013) meneliti hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan karakteristik tata kelola perusahaan. Variabel dependent yang digunakan adalah *CSR disclosure*. Untuk variabel independennya adalah *board size*, *board independence*, *ownership concentration* dan *managerial ownership*.

Muttakin dan Subramaniam (2015) melakukan penelitian dengan variabel independen berupa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan promoter, *board independence* (Bin & Taha, 2013; Jizi *et al.*, 2014), dan CEO Duality. Serta ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, *profitability* sebagai variabel kontrol. Obyek penelitiannya adalah top 100 perusahaan di *Bombay Stock Exchange* tahun 2007-2011 dengan menggunakan pengukuran 17 item pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan promoter tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan *board independence* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan *CEO duality* memiliki pengaruh signifikan negatif.

Di tahun yang sama, Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila (2015) juga melakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun penelitian tersebut dilakukan di Kuwait dengan menganalisis laporan tahunan 2012 perusahaan industri dan jasa yang terdaftar di Kuwait *Stock Exchange*. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan, kepemilikan pemerintah, industri, profitabilitas, *liquidity*, umur perusahaan, dan *leverage*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif, kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan variabel lain seperti umur perusahaan, *leverage*, *liquidity*, dan industri tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3 Pengaruh variable Independen Terhadap Dependen

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Ukuran suatu perusahaan dilihat dari seluruh asset yang ada dan dimiliki oleh perusahaan karena asset yang ada dalam satu perusahaan menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk operasional.

Penelitian menurut Sembiring (2005), Perusahaan yang besar akan mengungkapkan lebih banyak daripada perusahaan yang kecil karena perusahaan yang besar ialah emiten yang paling banyak diamati oleh publik sehingga perusahaan yang besar akan menghadapi risiko politik seperti keharusan dalam pemaparan tanggung jawab sosial yang lebih besar dibanding perusahaan yang kecil.

Alsaeed (2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbas (2014), Rouf (2011), Darmadi dan Gunawan (2012). Tetapi menurut penelitian Bayoud, Kavanagh, dan Slaughter (2012) tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Profitabilitas ialah suatu cara perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara beroperasional. Jika margin laba perusahaan lebih tinggi dari margin laba industry, masyarakat akan memilih untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dan menginformasikan kepada publik tentang kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan (Pahuja, 2009).

Biasanya, profitabilitas diukur melalui informasi finansial dan non finansial seperti kepuasan pelanggan, internal bisnis, serta inovasi dan pembelajaran manajemen. Akan tetapi, objek yang biasa diukur adalah bagian keuangan suatu perusahaan.

Mulyadi (2012), Muttakin dan Khan (2015) menemukan pengaruh signifikan positif antara profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun Ghazali (2007) dan Giannarakis (2014) tidak menemukan pengaruh signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.3 Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Leverage ialah ketergantungan perusahaan terhadap hutang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Abriyani, Wiryono, dan Sumirat, 2012). Suatu perusahaan jika memiliki tingkat *leverage* tinggi akan diminta oleh pemberi pinjaman untuk lebih banyak mengungkapkan informasi daripada rasio yang rendah (Naser & Hasan, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Chan, Watson, dan Woodliff (2013), Juhmani (2013) menemukan adanya hubungan positif antara *leverage* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al.* (2012) menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara *leverage* dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila (2015) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *leverage* dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Semakin lama perusahaan beroperasi, maka perusahaan dianggap telah menjalankan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan dan banyak kontribusi dengan lingkungan demi mempertahankan keberlangsungan perusahaan sendiri. Namun, semakin bersaing Negara berkembang banyak perusahaan lebih mementingkan keuntungan daripada tanggung jawab sosial perusahaan yang dirasa kurang memberikan hasil yang baik untuk perusahaan (Lucyanda, 2012).

Penelitian menurut Muttakin dan Subramaniam (2015), menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antara umur perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, ditahun yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi, Al-Mutairi dan Al-Duwaila menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara umur perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kepemilikan pemerintah adalah berapa banyak saham yang dimiliki oleh pemerintah yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah (Naser & Hasan, 2013). Pemerintah dapat menunjuk direktur dalam perusahaan sehingga setiap langkah keputusan usaha yang akan diambil merupakan campur tangan dari kepentingan pemerintah (Amran & Devi, 2008).

Penelitian Muttakin dan Subramaniam (2015) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi akan mendapatkan pantauan yang lebih besar oleh masyarakat sehingga kelalaian atau pengabaian masalah sosial dan lingkungan dapat ditekan, tentu hal ini berdampak kepada perusahaan lebih terbuka dalam pengelolaan kegiatan operasi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi *et al.* (2015) menemukan hasil kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh

Juhmani (2013) tidak menemukan adanya hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik individu ataupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Menurut Soliman *et al.* (2012), pelaksanaan tanggung jawab sosial di Negara berkembang telah banyak dipengaruhi oleh praktek manajemen gaya barat yang mempunyai keikutsertaan yang tinggi.

Pemerintah menuntut kepemilikan saham oleh investor asing untuk menaati regulasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 pasal 15 yang menyatakan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari tujuan pembangunan negara dan mensejahterakan masyarakat.

Khan (2010) dan Bowrin (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penelitian Amran dan Devi (2008) yang menyatakan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan (Soliman *et al.*, 2012). Dalam teori agensi, adanya kekuasaan dari pihak manajemen dalam mengalokasikan sumber daya guna memperoleh dorongan dari pemegang saham. Apabila jumlah saham yang dimiliki manajer mengalami peningkatan maka kepentingan manajer dengan para pemilik perusahaan sehingga dapat disetarakan sehingga mencegah terjadinya konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Khan *et al.* (2012) menyatakan perusahaan dengan jumlah kepemilikan manajerial yang tinggi akan cenderung mengurangi biaya investasi dalam aktivitas pertanggungjawaban sosial sebab biaya yang dikeluarkan lebih besar dari benefit yang bisa diperoleh sehingga dapat diprediksikan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga akan menurun. Akan tetapi berbeda dengan peneliti Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Juhmani (2013) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh karena pihak manajemen lebih mengedepankan produktivitas perusahaan, pencapaian laba penekanan biaya operasional, kepentingan pemegang saham lebih penting dan tanggung jawab sosial merupakan hal terpisah dan bukan menjadi pencapaian perusahaan.

2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab social

Kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, PT, reksadana, dana pensiun. Investasi pemegang saham institusi begitu besar sehingga kepemilikan institusi memiliki kemampuan lebih kecil dibandingkan pemegang saham individu untuk masuk dan keluar dari sebuah investasi, sehingga pemegang saham institusi tidak hanya memiliki minat dalam kinerja perusahaan namun dalam strategi, kegiatan dan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan.

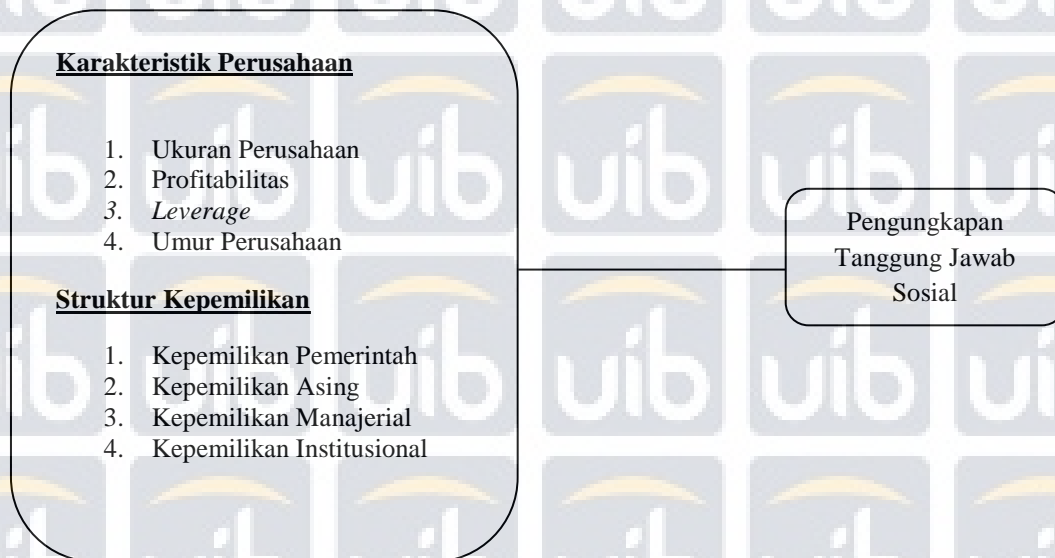
Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Anwar (2012) menemukan adanya hubungan signifikan positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, Mahoney, dan Rahman (2007) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.4 Model Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi *et al.* (2015) dan Soliman *et al.* (2012). Dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah rentang waktu dan objek penelitian, karena penelitian ini menggunakan laporan

tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015 dengan objek penelitian di Indonesia.



Gambar 1 Model Penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sumber: Al-Ajmi *et al.* (2015) dan Soliman *et al.* (2012).

2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran teoretis tersebut di atas maka kesimpulan hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₂: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₃: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₄: Umur Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₅: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₆: Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₇: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

H₈: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.